

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan panduan di dalam sebuah penulisan yang akan menjadi landasan konseptual dan teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai beberapa konsep yang memiliki hubungan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah konsep kesejahteraan sosial, konsep pelayanan sosial, konsep usaha kesejahteraan sosial, konsep program vokasional dan konsep kemandirian.

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal.

Di Amerika Serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan publik yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan memaksimalkan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Merujuk kepada undang-undang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”.

Adanya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual, dan sosial sehingga akan mendorong masyarakat menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya. Dalam hal ini peran dari tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakatnya harus ditingkatkan.

Ilmu kesejahteraan sosial merupakan kelanjutan dan sebuah penyempurnaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Karena itu latar belakang sejarah dari ilmu kesejahteraan sosial pada titik awal masihlah sama dengan pekerjaan sosial. Adapun definisi pekerjaan sosial menurut *Internasional Federation of Social Workers (IFSW)* (2000) yang dikutip oleh Adi (2005:12) adalah:

The social worker profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being.

Untisiling theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with the environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

Profesi pekerjaan sosial mendorong agar terciptanya perubahan sosial, membantu dalam pemecahan masalah pada relasi manusia, serta memberdayakan dan membebaskan manusia untuk mencapai derajat suatu kehidupan yang lebih baik. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial. Pekerjaan sosial mengintervensi ketika seseorang sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja sosial.

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah:

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

Pekerjaan sosial memiliki metode-metode yang dapat digunakan bersama-sama dan dapat saling melengkapi dalam proses penyelesaian. Dalam permasalahan perilaku remaja ini pekerja sosial dapat menggunakan metode utama pekerjaan sosial yaitu Social Case Work, dan Social Group Work.

1. Bimbingan Sosial Perseorangan (*Social Case Work*), menurut Friendlander yaitu cara menolong seseorang dalam konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan penyesuaian sosialnya sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang memuaskan dan bermanfaat.
2. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*), yaitu suatu metode untuk bekerja menghadapi orang-orang dalam suatu kelompok, guna meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan yang dianggap baik.

Melalui bimbingan sosial persorangan, pekerja sosial akan lebih efektif untuk memahami dan mengerti tentang klien yang memiliki potensi dan masalah. Pekerja sosial dapat mengeksplorasi keunikan dan keunggulan serta masalah yang sedang dihadapi klien untuk menyelesaikan suatu masalah secara lebih efektif dan dijamin kerahasiaannya.

Melalui bimbingan sosial kelompok, pekerja sosial dapat menggunakan kelompok sebagai media intervensi secara efektif dalam membentuk kepribadian klien, mengetahui minat dan bakat klien, masalah yang dihadapi klien melalui pendekatan kelompok sebagai media dalam melakukan intervensi keterampilan dan keahlian pekerja sosial secara efektif dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui ciri-ciri pokok bimbingan sosial masyarakat sebagai berikut :

1. Istilah bimbingan sosial masyarakat diartikan baik sebagai proses maupun sebagai bidang praktek.
2. Proses pengorganisasian suatu masyarakat dapat merupakan bagian dari pekerjaan sosial, tapi juga dapat merupakan kegiatan diluar pekerjaan sosial.
3. Proses bimbingan organisasi masyarakat dapat dilaksanakan oleh organisasi sebagai fungsi primer dan sebagai fungsi sekunder.

4. Proses bimbingan organisasi masyarakat tidak hanya dapat dilaksanakan pada tingkat desa ketetangaan, tapi juga pada tingkat daerah propinsi dan nasional.
5. Bahwa lembaga-lembaga yang melaksanakan bimbingan sosial masyarakat sebagai fungsi pimernya tidak memberikan bantuan atau pelayanan kepada klien secara langsung.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Fahrudin (2012:10) Kesejahteraan Sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasirelasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Schneiderman (1972) dalam Menurut Fahrudin (2012:10), mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system, dan perubahan system.

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal

yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

a) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

b) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan Sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Support*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan sosial yang lain.

Melihat kutipan di atas bahwa adanya fungsi dalam kesejahteraan sosial, untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, ataupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali dengan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. Serta terhindar dari masalah-masalah sosial baru dan mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan dari terjadinya perubahan-perubahan dari sosio-ekonomi.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Profesi pekerjaan sosial secara singkat diartikan suatu bentuk pertolongan bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, pertolongan yang dimaksud adalah secara ilmiah, profesional, dan objektif. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2012:60) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut: *“Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance a restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals”* (Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa keberfungsian sosial merupakan maksud dari profesi pertolongan pekerjaan sosial. Hampir sama dengan definisi diatas, International Federation of Social Workers (IFSW) (Tan dan Envall, 2000:5) (Suharto 2009:1-2) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

The social work profession promotes problem solving in human relationship, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments, principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

(Profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia, serta perbaikan masyarakat. menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial, pekerjaan social melakukan intervensi pada titik (atau situasi) dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial sangat penting bagi pekerjaan sosial).

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan social merupakan profesi yang tidak hanya memberikan pertolongan manusia sebatas memampukan individu untuk memecahkan masalahnya, akan tetapi lebih berorientasi pada aplikasi hingga pada pencapaian hak-hak hidup masyarakat. Masalah anak yatim merupakan salah satu sasaran dari profesi pekerjaan sosial, maka diharapkan institusi dapat memberikan pola asuh pertolongan yang mengarah pada suatu pencegahan dan pengembangan.

2.2.2 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah satu di antara kegiatan dalam pemberian pelayanan sosial (*social service*). Pelayanan sosial mempunyai bermacam-macam bentuk sesuai dengan fungsi-fungsinya sebagaimana dikemukakan Max Siporin (1975) dalam Huraerah (2011:39), yaitu:

- a. Pelayanan akses (*access services*), mencakup pelayanan informasi, rujukan, advokasi, dan partisipasi. Tujuannya membantu orang agar bisa mencapai atau menggunakan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- b. Pelayanan terapis, pertolongan, dan rehabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan dan perawatan pengganti, seperti pelayanan yang diberikan oleh badan-badan yang menyediakan konseling, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan pekerjaan sosial dan medis dan sekolah, program-program koreksional, perawatan bagi orang-orang usia lanjut (jompo), dan sebagainya.
- c. Pelayanan sosialisasi dan pengembangan, seperti tempat penitipan bayi/anak, KB (keluarga berencana), pendidikan keluarga, pelayanan rekreasi bagi pemuda, pusat kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Lebih lanjut Max Siporin (1975) menyebutkan, fungsi dasar pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat system kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- b. Menjamin standar penghidupan, kesehatan, dan kesejahteraan social yang memadai bagi semua
- c. Memungkinkan orang berfungsi secara optimal dalam peranan dan status kelembagaan sosial mereka.
- d. Mendukung dan memperbaiki tata sosial dan struktur kelembagaan masyarakat.

Dari pengertian di atas semuanya merupakan kebutuhan sosial setiap masyarakat, dan tersirat bahwa fungsi pekerjaan sosial ini memberikan pelayanan atau informasi bagi setiap masyarakat yang datang ke pekerja sosial atau ke lembaga kesejahteraan sosial. Di Panti Asuhan Min Fadli Robby belum memiliki pekerja sosial.

2.3 Konsep Pelayanan Sosial

2.3.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Tekanan telah berubah dari usaha sosial yang bersifat rehabilitasi kepada orang-orang miskin, dari usaha kesejahteraan anak dan keluarga tradisional, usaha probasi dan usaha-usaha klinis kepada pendidikan. Usaha-usaha tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan (*skill*) atau dengan mengurangi kesulitan dalam fungsionalitas pribadi, masyarakat dapat ditingkatkan kondisinya. Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan masyarakat. Adapun definisi mengenai pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) adalah:

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu warga Negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.

Pelayanan sosial merupakan istilah yang tidak mudah dijelaskan, selain itu pengertian pelayanan sosial tidak sama untuk Negara yang berbeda. Di Inggris misalnya, istilah itu digunakan untuk pelayanan servis dan manfaat benefit yang berorientasi orang. Pelayanan sosial menurut Fahrudin (2012:51) mendefinisikan pelayanan sosial adalah :

Pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga keluarga melalui 1) Sumber-sumber sosial pendukung; dan 2) Proses-proses meningkatkan kemampuan individu-individu dan keluarga-keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan-tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Melihat definisi di atas bahwa adanya penyelenggaraan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan keberfungsian sosial seseorang agar kembali seperti biasanya dan memperbaiki kualitas kehidupan dengan sumber pendukung yang memadai. Maka jelas pelayanan sosial dibutuhkan seiring modernisasi dewasa ini agar mampu membantu orang yang memiliki permasalahan sosial.

2.3.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk melindungi, mengadakan perubahan, atau menyempurnakan kegiatan-kegiatan pendidikan, asuhan anak, penanaman nilai, dan pengembangan hubungan sosial yang di masa lampau menjadi fungsi keluarga, lingkungan tetangga, dan kerabat. Perkembangan pelayanan sosial yang sangat cepat, motivasi yang beraneka ragam, diantara para penyusunnya dan besarnya beban kasus maupun tenaga yang terlibat di dalamnya menyebabkan perlunya menggunakan pelayanan. Pelayanan sosial cenderung menjadi pelayanan yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan khusus. Menurut Fahrudin (2012:54) menjelaskan tentang fungsi-fungsi pelayanan sosial adalah:

1. Pelayanan-pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
2. Pelayanan-pelayanan untuk terapi, pertolongan, dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.

3. Pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Pelayanan sosial merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga mereka dapat berkembang dan mereka bisa mendapatkan sebuah perlindungan. Selain itu dengan adanya pelayanan sosial masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi dan nasihat yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakantindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

2.3.3 Metode Pekerjaan Sosial

Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh peksos sebagai berikut:

a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*)

Bimbingan sosial perorangan menurut Swift yang dikutip oleh Muhudin (1992:11) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya

seorang peksos harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja sosial dengan klien. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

1. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
2. Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.
3. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
4. Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.

b. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok menurut Tacter yang dikutip oleh Muhidin (1992:11) menyatakan bahwa:

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu kelompok dari lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja sosial atau petugas yang membimbing interaksi didalam program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri dengan satu yang lain dan kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya selaras dengan

kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah:

1. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
3. Penciptaan interaksi terpimpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.
4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusankeputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.

5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
6. Penggalan sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

c. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Penyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

2.3.4 Intervensi Pekerjaan Sosial

Kehadiran profesi pekerjaan sosial di tengengah-tengah masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu kelompok, maupun masyarakat yang kemudian setiap kegiatannya difokuskan kepada hubungan sosial klien yang melakukan interaksi dengan lingkungan dimana mereka hidup. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetarso dalam Huraerah (2011:39) yang mengemukakan bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi pemberian bantuan yang dilaksanakan melalui pengembangan interaksi timbal-balik yang saling menguntungkan antara orang dan lingkungan sosialnya (perorangan, keluarga, kelompok, organisasi, komunitas, dan masyarakat) untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan orang tersebut sebagai satu kesatuan yang harmonis yang berlandaskan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Berkenaan dengan pernyataan tersebut, maka terdapat keterkaitan yang cukup erat antara pelaksanaan advokasi dengan profesi pekerjaan sosial, karena dibentuknya sebuah lembaga Sinergi Foundation dengan kegiatan advokasi bebas rentenir ialah agar membantu mustahik yang sedang dihadapkan pada suatu permasalahan agar dapat diselesaikan permasalahannya dengan mempertahankan hak-hak yang dimiliki mustahik dan menjunjung keadilan sosial yang sudah diterapkan oleh Negara.

Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pekerjaan sosial diantaranya sebagai fasilitator, *broker*, *mediator*, pembela, dan pelindung. Lima peran ini sangat penting diketahui oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok atau masyarakat yang sedang memiliki permasalahan. Menurut Soeharto (2010:98) menjelaskan lima peranan pekerja sosial dalam bidang Advokasi, yaitu:

1. Fasilitator

Dalam konteks pekerjaan sosial, peranan sebagai fasilitator sering disebut sebagai *enabler*, bahkan tidak jarang kedua istilah tersebut dipertukarkan satu sama lain.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan

pengaturan perasaan-perasaan, melakukan identifikasi dan dorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-aset sosial, pemilihan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

2. *Broker*

Istilah *broker* dalam hal ini merujuk pada pengertian bahwa pekerja sosial melakukan peranannya sebagai penghubung antara klien dengan penyedia layanan yang dibutuhkan. Pekerja sosial harus mampu menjamin agar klien memperoleh pelayanan yang baik, sehingga mereka dapat memperoleh sumber-sumber yang merupakan kebutuhan bagi dirinya.

3. *Mediator*

Dalam perspektif pekerjaan sosial, peranan sebagai *mediator* dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi penengah dalam penyelesaian suatu kasus/permasalahan. Pekerja sosial menjadi orang ketiga dalam penyelesaian sebuah kasus tertentu, pekerja sosial harus menghasilkan sesuatu yang positif agar dapat menghindari pihak yang terkait mengalami kerugian. Dalam hal ini pekerjaan sosial harus bersifat netral, artinya dia tidak berpihak kepada siapapun, melainkan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur perdagangan.

4. *Pembela*

Pada umumnya pekerja sosial yang melakukan kegiatan advokasi seringkali dihadapkan dengan sistem politik dalam menjamin kebutuhan dan sumber yang diperlukan oleh klien. Pekerja sosial mampu memainkan peranannya sebagai pembela, jika pelayanan yang ada dan sumber-sumber sangat sulit dijangkau oleh klien.

5. *Pelindung*

Pekerja sosial harus mampu menjadi pelindung bagi orang-orang yang tidak berdaya. Disini, pekerja sosial melakukan peranannya sebagai pelindung dengan berdasarkan pada kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang rentan lainnya. Intervensi merupakan kegiatan pemecahan masalah penerima pelayanan, dalam pelaksanaannya pekerja sosial dituntut untuk melibatkan penerima pelayanan secara aktif pada setiap kegiatan yang dilaksanakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial haruslah menguasai lima peranan tersebut agar memudahkan pekerja sosial untuk menyelesaikan sebuah permasalahan-permasalahan tertentu. Diantaranya pekerja sosial harus bisa menjadi fasilitator agar dapat memenuhi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian pekerja sosial harus bisa menjadi seorang penghubung antara masyarakat dan sistim sumber/ lembaga yang member pelayanan. Selain itu pekerja sosial harus dapat membela dan melindungi masyarakat dari gangguan dari pihak-pihak tertentu.

2.3.5 Masalah Sosial

Secara luas, masalah sosial sangatlah sederhana untuk diartikan. Menurut Jensen (1992:42) yang dikutip oleh Suharto (2005:83), masalah sosial secara umum didefinisikan sebagai berikut: “Perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya”. Dalam hal ini, masalah difokuskan kepada masalah sosial.

Menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2005:82) mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut: “Suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif”. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun

demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, maka masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media massa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan di koran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonism, orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainya. Ukuran “baik” atau “buruk” sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunu diri adalah masalah sosial, apabila ilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertetangan dengan aturanaturan umum. Tetapi pada masyarakat yang memandang penggunaan minuman keras, misalnya sebagai sesuatu yang “wajar” dan “biasa”, penggunaan *whisky*, *jhony walker* atau *sampagne* bukanlah masalah sosial, meskipun dilakukan banyak orang.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar, akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau

membeli obat sakit kepala. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksis sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

2.4 Konsep Usaha Kesejahteraan Sosial

2.4.1 Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Suharto (2010:4) mendefinisikan usaha kesejahteraan sosial yaitu: “Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, usaha kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.4.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Suharto (2010:4), tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan standar hidup
- b. Peningkatan keberdayaan
- c. Penyempurnaan kebebasan

Adapun penjelasan dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan standar hidup melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.
- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

2.4.3 Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Merujuk pada definisi *welfare* dari Howard Jones (1990) dalam Suharto (2010:8), “Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”. Makna “kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” tidak hanya menunjuk pada “kemiskinan fisik”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup bentuk masalah sosial yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia, pelacuran, pengemis, pekerja migrant, dan sebagainya. Suharto (2010:9) mengungkapkan bahwa: “Usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”. Maksudnya, usaha kesejahteraan

berfokus pada beberapa pelayanan yang ada pada pemerintah seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan.

2.5 Konsep Vokasional

2.5.1 Pengertian Vokasional

Keterampilan hidup yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat dimasyarakat disebut sebagai keterampilan vokasional atau keterampilan vokasional. (Iswari, 2007: 28). Dengan memiliki keterampilan vokasional seseorang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada lingkungannya.

2.5.2 Keterampilan Vokasional bagi Anak Disabilitas

Layanan keterampilan vokasional yang diberikan untuk anak disabilitas, khususnya anak tunarungu di sekolah luar biasa mestinya menyesuaikan bakat, minat serta kebutuhan pasar kerja. Dalam pelaksanaannya harus dimulai dengan hal-hal yang sederhana dan konkret, sehingga dalam pelaksanaannya praktek secara langsung lebih diutamakan. Hal tersebut penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi kelainan masing-masing individu. (Suparno, dkk, 2009: 2). Hal ini terkait dengan kemampuan anak tunarungu dalam menangkap informasi, yaitu dengan mengutamakan visual atau penglihatan, sehingga dalam pelaksanaannya praktek secara langsung lebih diutamakan, sehingga peserta didik mampu memahami keterampilan vokasional yang diberikan sekaligus mengurangi kemungkinan kesalahan persepsi yang mungkin terjadi selama pembelajaran diberikan.

Anak tunarungu menurut Iswari (2007: 57) adalah individu atau anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik kehilangan kemampuan mendengar sama sekali maupun kehilangan kemampuan mendengar sebagian. Sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam belajar berbahasa, berkomunikasi, perkembangan kepribadian, serta sosial dan emosinya. Anak tunarungu secara fisik tidak mengalami hambatan sehingga banyak

keterampilan yang dapat diberikan, salah satunya adalah keterampilan memasak atau Tata Boga. Keterampilan tata boga dapat diberikan untuk anak tunarungu karena tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi selain itu memiliki nilai ekonomi. Sehingga diharapkan dengan pemberian bekal keterampilan memasak (Tata Boga) pada anak nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sifat istimewa dari keterampilan ialah keterampilan ini bisa bertambah sempurna melalui praktek atau latihan. Syaratnya ialah pengulangan gerakan dasar disertai dengan balikan dari lingkungan (Liunir, 2006: 3). Keterampilan Peningkatan Keterampilan Vokasional (Rakhmad Fitriawan).

Peningkatan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu dengan memberikan keterampilan vokasional tata boga adalah untuk membantu anak agar dapat mandiri secara ekonomi, karena dengan memiliki keterampilan vokasional memasak (tata boga) anak diharapkan mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai ekonomis, sekaligus untuk menanamkan sikap dan jiwa kewirausahaan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja.

2.6 Konsep Dasar Tunarungu

2.6.1 Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu adalah istilah lain dari tuli yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran secara etimologi, tunarungu bersala dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna artinya kurang dan runggu artinya pendengaran. Jadi, orang dikatakan tunarungu apabila dia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Hal ini juga ditambahkan oleh Haenudin (2013), Tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”, tuna artinya kurang dan runggu artinya pendengaran.

Sedangkan menurut Hallahan dan Kauffman dalam Wardani (2015). Tunarungu (*hearing impairment*) ialah ketidakmampuan mendengar dari yang ringan sampai yang berat sekali yang digolongkan kepada tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*hard of hearing*).

Menurut Arifin (2015) anak tunarungu adalah seorang anak yang mengalami kerusakan pada satu atau lebih pada organ telinga luar, organ telinga bagian tengah, dan organ telinga bagian dalam sehingga organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tunarungu merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami ketidakmampuan mendengar karena adanya kerusakan pada organ telinga.

2.6.2 Jenis-jenis Tunarungu

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes audiometris. Dwidjosumarto dalam Putri (2018) mengemukakan bahwa klasifikasi tunarungu berdasarkan kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tingkat I, Kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB. Penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus.
2. Tingkat II, Kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.
3. Tingkat III, Kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB
4. Tingkat IV, Kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas.

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III dan IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Sedangkan, Winarsih dalam Putri (2018) membagi Klasifikasi ketunarunguan menjadi tiga, yakni berdasar saat terjadinya ketunarunguan, berdasarkan tempat kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasar pada taraf penguasaan bahasa.

1. Berdasarkan sifat terjadinya
 - a. Ketunarunguan bawaan, artinya ketika lahir anak sudah mengalami/menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi.
 - b. Ketunarunguan setelah lahir, artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.
2. Berdasarkan tempat kerusakan
 - a. Kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk ke dalam telinga disebut Tuli Konduktif.
 - b. Kerusakan pada telinga bagian dalam sehingga tidak dapat mendengar bunyi/suara, disebut Tuli Sensoris.
3. Berdasarkan tempat kerusakan
 - a. Tuli pra bahasa (*prelingually deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasanya suatu bahasa (usia 1,6 tahun) artinya anak menyamakan tanda (*signal*) tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya namun belum membentuk system lambang.
 - b. Tuli purna bahasa (*post linguallly deaf*) adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami system lambang yang berlaku dilingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi dalam dunia pendidikan diperlukan untuk menentukan bagaimana intervensi yang akan dilakukan lembaga terkait. Ada banyak jenis klasifikasi termasuk yang sudah dipaparkan di atas. Klasifikasi di atas merupakan jenis klasifikasi yang membagi tunarungu menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kehilangan kemampuan pendengarannya, sifat terjadi kerusakan, tempat terjadi kerusakan, dan taraf penguasaan bahasa.

2.6.3 Karakteristik Tunarungu

Menurut Apriana (2017), Karakteristik yang dimiliki penyandang tunarungu:

1. Karakteristik dalam aspek bahasa dan bicara

Kemampuan berbahasa memerlukan ketajaman pendengaran. Hal ini dikarenakan melalui pendengaran seseorang dapat meniru berbagai suara di sekitarnya. Bagi penyandang tunarungu, mereka memiliki hambatan pendengaran yang berdampak pada kemampuan berbahasa dan berbicara. Akibatnya, perkembangan bahasa dan bicaranya menjadi berbeda dengan perkembangan bahasa dan bicara anak normal. Berikut adalah karakteristik segi bahasa dari anak tunarungu:

- a. Miskin dalam perbendaharaan kata, sehingga kesulitan pula bagi dirinya untuk mengekspresikan bahasa dan bicaranya;
- b. Penggunaan bahasa isyarat atau berbicara verbal tergantung dari kebiasaan di lingkungan anak;
- c. Keterbatasan untuk membentuk ucapan dengan baik, oleh karena berbicara lisan (verbal) diperlukan sejumlah kata-kata;
- d. Irama dan gaya bahasanya monoton;
- e. Sulit memahami kata-kata yang bersifat abstrak;
- f. Sulit memahami kata yang mengandung kiasan;
- g. Bahasa tulisan terlihat pendek-pendek, sederhana, dan menggunakan bahasa yang diingatnya saja;
- h. Seringkali menggunakan kalimat tunggal, tidak menggunakan kata-kata yang banyak oleh karena keterbatasan dalam mengingat kata-kata yang rumit (Tanjung, 2014).

Sedangkan menurut Atmaja (2018) mengatakan, karakteristik anak tunarungu dalam segi bahasa dan bicara adalah sebagai berikut: (1) Miskin Kosakata, (2) Mengalami kesulitan dalam mengerti ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan dan kata-kata abstrak, (3)

kurang menguasai irama dan gaya bahasa, (4) Sulit memahami kalimat-kalimat kompleks atau kalimat-kalimat yang panjang serta bentuk kiasan.

2. Karakteristik dalam aspek emosi- sosial

Anak tunarungu pada dasarnya juga memiliki keinginan untuk mengetahui dunia di sekitarnya. Namun, karena kemampuan mendengarnya terhambat, segala hal yang terjadi di sekelilingnya seperti terkesan tiba-tiba. Hal ini tentu mempengaruhi perkembangan emosi dan sosialnya. Perasaan bingung dan tidak mengerti mewarnai perkembangan emosinya pada tahap awal ketika anak tidak atau belum menyadari keberadaannya pada dunia yang berbeda dengannya.

Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam berbahasa- bicara yang merupakan alat untuk melakukan kontak sosial dan mengekspresikan emosinya. Sudah menjadi kejelasan bahwa hubungan sosial banyak ditentukan oleh komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Keterbatasan dalam mendengar atau menggunakan bahasa-bicara dalam mengadakan kontak sosial tadi berdampak pula padanya untuk menarik diri dari lingkungan (terisolir), ditambah sekelilingnya kurang peduli terhadap keberadaannya

3. Karakteristik dalam aspek motoric

Anak dengan gangguan pendengaran tidak ketinggalan oleh anak normal dalam perkembangan bidang motorik. Bahkan tidak jarang anak tunarungu baru dapat dikenali ketika mereka diajak berkomunikasi. Perkembangan motorik kasar anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan, terlihat otot-otot tubuh mereka cukup kekar, mereka memperlihatkan gerak motorik yang kuat dan lincah.

4. Karakteristik dalam aspek kepribadian

Anak tunarungu memiliki keterbatasan dalam merangsang emosi. Ini yang menyebabkan anak tunarungu memiliki pola khusus dalam kepribadiannya. Mereka memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, agresif, mementingkan diri sendiri dan kurang mampu dalam mengontrol

diri sendiri (impulsif), kurang kreatif, kurang mempunyai empati, emosinya kurang stabil bahkan memiliki kecemasan yang tinggi.

Jika dilihat secara fisik, anak tunarungu memang tidak jauh berbeda dengan anak normal lainnya. Namun, kecacatan yang diderita oleh anak dengan gangguan pendengaran menampilkan sesuatu karakteristik atau sifat yang khas atau berbeda dari anak normal. Anak tunarungu memiliki sifat egosentris yang tinggi, yaitu:

- a. Memiliki perasaan takut akan hidup yang lebih luas selain keluarganya
- b. Memiliki sifat ketergantungan pada orang lain (keluarganya). Kurang mandiri, senang bergaul dengan orang yang dekat saja.
- c. Perhatian pada sesuatu yang terpusat, sulit untuk dialihkan apalagi disenangi dan sudah dikuasainya
- d. Memiliki imajinasi yang rendah
- e. Memiliki sifat yang polos, sederhana tanpa nuansa Memiliki sifat yang ekstrim atau bertahan pada sesuatu yang dianggapnya benar sering dikatakan sebagai anak yang keras kepala

2.6.4 Keterbatasan Tunarungu

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan sering kali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah dan ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif atau sebaliknya menampilkan kebimbangan. Pengaruh lingkungan atau pengaruh kondisi luar dirinya juga sering menimbulkan emosi negatif pada anak tunarungu.

Ketunarunguan yang diderita sejak lahir akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyangkut seluruh hidup dan penghidupan penyandanginya. Boothroyd dalam Wasita (2012) memprediksikan bahwa masalah yang akan muncul yaitu:

1. Masalah dalam bidang kognitif

Pada umumnya intelegensi penyandang tunarungu secara potensial sama dengan anak normal. Namun, akibat dari keterbatasan kemampuan berbahasanya, keterbatasan informasi, dan daya abstraksi dari penyandang tunarungu sebagai dampak dari kehilangan pendengaran tersebut menyebabkan proses pencapaian yang lebih luas terkendala atau terhambat.

Kerendahan tingkat intelegensi anak tunarungu bukan berasal dari hambatan intelektualnya yang diakibatkan ketunarunguan tersebut antara lain :

rendah melainkan secara umum karena intelegensinya tidak mendapat kesempatan untuk berkembang. Tidak semua aspek intelegensi menjadi terhambat. Aspek intelegensi yang terhambat perkembangannya adalah yang bersifat verbal, misalnya merumuskan pengertian hubungan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian.

2. Masalah dalam bidang emosi

Kekurangan akan pemahaman bahasa lisan atau tulisan sering kali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan sesuatu secara negatif atau salah. Hal ini sering menjadi tekanan bagi emosinya. Tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap sikap menutup diri, bertindak agresif ataupun menunjukkan sikap menampakkan kebimbangan.

Pengaruh lingkungan atau pengaruh kondisi luar dirinya juga sering menimbulkan emosi negatif pada anak tunarungu. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2010) di asrama anak tunarungu muncul akibat factor eksternal. Emosi negatif tersebut antara lain:

- 1) Bosan. Karena tidak dapat melakukan banyak aktivitas seperti ketika berada di lingkungan rumah;

- 2) Kecewa dan sedih. Karena iri melihat teman lain dikunjungi orang tua atau sudaranya;
 - 3) Kesepian. Karena mereka dikumpulkan dan dikondisikan dengan anak-anak yang memiliki kondisi yang sama;
 - 4) Perasaan tidak berdaya. Karena rutinitas di asrama yang monoton;
 - 5) Perasaan cemas dan takut. dengan anak-anak yang memiliki kondisi yang sama;
 - 6) Perasaan tidak berdaya. Karena rutinitas di asrama yang monoton;
 - 7) Perasaan cemas dan takut. Karena diharuskan melakukan aktivitas yang tidak disukainya seperti membersihkan kamar mandi;
 - 8) Perasaan iri hati. Karena harus tinggal di asrama.
3. Masalah sosial

Kehilangan pendengaran yang menyebabkan miskinnya kebahasaan yang dimiliki menghambat komunikasi penyandang tunarungu secara nyata. Akibatnya, mereka akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungannya, terutama dalam hal menyesuaikan diri dengan kondisi yang belum lazim dialaminya. Akibat berikutnya yang muncul adalah emosi negatif seperti kecemasan karena menghadapi lingkungan yang beraneka ragam komunikasinya. Penyandang tunarungu sering mengalami berbagai konflik, kebingungan, dan ketakutan karena mereka sebenarnya hidup dalam lingkungan yang bermacam-macam.

Hal ini juga dikatakan oleh Sary (2014), ketunarunguan dapat mengakibatkan adanya hambatan dalam perolehan bahasa, sehingga hal ini akan berdampak pada kemampuan berinteraksi maupun berkomunikasi serta pemahaman individu terhadap kejadian sosial disekitarnya.

Efendi dalam Lelyana (2017), menambahkan bahwa dampak dari ketunarunguan salah satunya adalah lebih menampakkan sikap asosial. Penyandang tunarungu juga

lebih menunjukkan sikap bermusuhan dan menarik diri dari lingkungan, lebih sensitif dikarenakan munculnya perasaan terasing dan mengakibatkan munculnya banyak emosi negatif pada remaja tunarungu.

4. Masalah bagi orang tua dan masyarakat

Bagi orang tua tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa anaknya menderita kelainan atau cacat. Reaksi orang tua mengetahui bahwa anaknya menderita tunarungu adalah merasa terpukul dan bingung hingga timbulnya rasa bersalah.

Sedangkan bagi masyarakat, pada umumnya orang masih berpendapat bahwa penyandang tunarungu tidak dapat berbuat apa pun, terbelakang, dan sulit mendapatkan lapangan kerja dan sebagainya.

Masalah-masalah yang muncul tersebut didasarkan pada suatu pemikiran bahwa anak tunarungu yang kehilangan sebagian atau seluruh pendengarannya mengakibatkan bunyi atau suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi menjadi kurang dan atau tidak berarti. Terutama bunyi bahasa yang dapat mengantarkan seseorang dalam jajaran manusia intelektual.

Sejalan dengan pemikiran ini Helen Keller dalam Wasita (2012) mengemukakan bahwa ketunarungan merupakan musibah yang lebih buruk daripada ketunanetraan. Hal ini karena hilangnya rangsangan yang paling vital, yaitu suara manusia yang membawa bahasa, yang dapat mengubah pikiran dan menempatkan seseorang dalam jajaran manusia intelektual. Oleh karena itu, anak penyandang tunarungu disebut sebagai *children with problem in learning* (anak dengan problema dalam belajar), yang berkonsekuensi pada *children with special needs* (anak dengan berkebutuhan khusus).

Ketunarungan yang berdampak pada kemiskinan bahasa dan hambatan dalam berkomunikasi dianggap menyulitkan orang lain termasuk dalam layanan

pendidikannya. Hal ini dapat dibuktikan terutama di Indonesia hingga kini layanan pendidikan bagi anak tunarungu sebagian besar bersifat segregatif, yaitu pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang terpisah dari satuan pendidikan pada umumnya. Wujud pendidikan segregatif ini lazim dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Keseluruhan layanan pendidikan segregatif ini adalah anak kehilangan haknya untuk belajar, bersosialisasi, dan berkomunikasi dengan teman sebayanya yang mendengar.